

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, serta seni dan budaya yang semua itu merupakan sumber daya dan modal yang besar bagi pengembangan dan peningkatan pariwisata (R. Saputra, 2018). Setiap daerah di Indonesia memiliki wisata yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi wisatawan baik itu obyek wisata, sarana transportasi, akomodasi, restoran dan rumah makan, hiburan serta interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat (R. Saputra, 2018).

Pariwisata memberikan dampak yang sangat luas pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan ketahanan. Membangun pariwisata tidak hanya dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak dasar manusia saja namun juga merupakan sarana untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat (Lumenta et al., 2019). Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditunjukkan untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek wisata di Indonesia serta menumpuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Lumenta et al., 2019).

Pariwisata merupakan salah satu industri jasa yang pertumbuhannya cepat dan mempunyai banyak peluang untuk terus berkembang (Aprilia & Idialis, 2023). Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi

aktivitas ekonomi riil yang mampu mengurangi masalah kemiskinan dalam perekonomian. Efek positif akibat dari berkembangnya sektor pariwisata antara lain dapat menurunkan angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar destinasi pariwisata tersebut (Eddyono, 2019).

Apabila tidak dikelola dengan benar pariwisata yang ada tidak akan menambah pendapatan daerah (Tutik Tutik, 2022) . Oleh sebab itu, pemerintah menyerahkan pengelolaan wisata agar dikelola oleh otonomi daerah (Novianti et al., 2020). Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri (Elim, 2016) & (Rizqy Ramadhan, 2019). Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang didapatkan dari wilayah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Menurut UU No 28 Tahun 2009 retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Yahaya & Agusta, 2020).

Pendapatan retribusi daerah dapat diperoleh dari jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Salah satu jenis retribusi jasa usaha adalah mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Penerimaan retribusi dari sektor pariwisata diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Purwaningsih & Sunaningsih, 2021).

Berdasarkan APBD Tahun 2021 dan 2022 retribusi daerah Kabupaten Sampang meningkat pesat dibanding dengan kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Sumber dari retribusi daerah tersebut salah satunya berasal dari destinasi wisata.

Tabel 1.1 Realisasi retribusi daerah

Kabupaten	2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
Bangkalan	22.92 M	13.36 M	58.29	13.67 M	10.41 M	76.14
Sampang	32,13 M	20,90 M	65.04	47,24 M	30,02 M	63.54
Pamekasan	8.87 M	10.05 M	113.38	15,87 M	8,50 M	53.29
Sumenep	9.37 M	10.09 M	107.62	9,32 M	16,80 M	180.33

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan informasi yang di dapat dari web itrip.id, salah satu daerah yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di Pulau Madura adalah Kabupaten Sampang (Maulidiya et al., 2020). Kabupaten Sampang berada pada

posisi strategis karena terletak diantara Kabupaten Bangkalan Dan Pamekasan. Posisi strategis tersebut dapat menjadi peluang dalam pengembangan wilayah baik secara ekonomi maupun sosial. Destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Sampang sangat beragam, diantaranya adalah wisata alam, wisata kuliner, wisata minat khusus, dan wisata buatan. Untuk wisata alamnya terdiri dari Hutan Kera Nepa, Air Terjun Toroan, Karang Laut Mandangin, Pantai Camplong, dan Pantai Lon Malang. Untuk wisata kuliner terdiri dari Bebek Songkem Pak Salim dan Rujak Rok Erok. Untuk wisata minat khusus ada kampung milon napote, dan waduk nipah sebagai wisata buataannya.

Berikut data kunjungan wisatawan selama tahun 2021 yang disajikan oleh dinas pariwisata kabupaten Sampang diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan

Obyek Wisata	Total Wisnus
Pantai Camplong	15.450
Waduk Klampis	2.540
Hutan Kera Nepa	4.860
Air Terjun Toroan	15.812
Situs Ratu Ibu	2.569
Situs Trunojoyo	379
Makam dan Sumur Tujuh PanjiLaras	951
Karang Laut Mandangin	3.321
Kampung Milon Napote	18.628
Pantai Lon Malang	69.487

Sumber : pariwisata.sampang.go.id

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas dapat diketahui bahwa wisata yang sering dikunjungi adalah wisata alam. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan di pantai lon malang sebanyak 69.487, pantai camplong sebanyak 15.450, kampung milon napote sebanyak 18.628, dan air terjun toroan sebanyak 15.812. Berdasarkan ringkasan penjabaran APBD Kabupaten Sampang yang

diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi daerah senilai Rp 32.133.135.800, dari jumlah tersebut retribusi jenis jasa usaha berkontribusi sebesar Rp 2.354.738.000 atau sebesar 7.3% dari total penerimaan retribusi daerah tahun 2021.

Sedangkan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2021 berkontribusi sebesar Rp 250.000.000, nilai tersebut termasuk rendah jika dibandingkan dengan retribusi tempat khusus parkir pada tahun 2021 yakni senilai Rp 991.750.000. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan retribusi masuk ke tempat wisata nilainya hampir sama dibandingkan dengan retribusi parkir yang telah disediakan. Fenomena tersebut menjadi alasan peneliti untuk memilih beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Sampang sebagai daerah objek penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan retribusi wisata yang ada di Kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan retribusi wisata di Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan retribusi wisata di Kabupaten Sampang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi acuan bagi kalangan akademisi mengenai hal terkait pengelolaan retribusi. Selain itu juga dapat menjadi acuan untuk penelitian mendatang mengenai penerimaan retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan retribusi yang ada di Kabupaten Sampang.